

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap daerah pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *good governance*. Pemerintah yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerah, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Peran serta masyarakat dalam pemerintah sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal ini pelaksanaan perekonomian Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka merupakan salah satu instansi yang melaksanakan ketentuan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Regulasi tersebut mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sebagai bagian dari sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD).

Dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku secara umum dan memenuhi prinsip ketepatan waktu. BPKPD Kabupaten Malaka, sebagai salah satu entitas akuntansi,

memiliki tanggung jawab untuk mencatat seluruh transaksi keuangan daerah, baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, maupun pengelolaan aset. BPKPD juga berperan sebagai unsur pendukung pemerintah daerah dengan fungsi utama, antara lain: merumuskan kebijakan teknis di bidang keuangan, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang keuangan, melakukan pembinaan serta pengelolaan administrasi keuangan, menyelenggarakan ketatausahaan badan, serta melaksanakan tugas tambahan dari bupati sesuai dengan kewenangan yang melekat.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka berperan penting dalam mengelola dan mencatat seluruh transaksi keuangan daerah, baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, maupun pengelolaan aset. BPKPD juga berfungsi sebagai unsur pendukung yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis di bidang keuangan, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik terkait keuangan, serta melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh BPKPD menjadi indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Namun, meskipun Kabupaten Malaka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat beberapa catatan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan temuan BPK pada tahun 2023, ditemukan kelebihan pembayaran jasa hotel dalam pelaksanaan perjalanan dinas pada 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta kelebihan pembayaran atas sembilan paket

pekerjaan belanja modal pada empat SKPD. Temuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan anggaran yang berpotensi merugikan daerah, meskipun laporan keuangan memperoleh opini WTP dari BPK (BPK, 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki empat karakteristik utama, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Karakteristik tersebut merupakan syarat normatif agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan menjadi indikator penting dalam mendukung terwujudnya *good governance*.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi isu penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan pemerintah dituntut untuk mampu memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi krusial karena laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Oleh karena itu, penguatan aspek akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, salah satunya ialah laporan keuangan.

Berdasarkan paparan diatas, hal ini menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah daerah, yakni diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah masing-masing sehingga muncul adanya tuntutan akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal pemerintah. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan dicek oleh auditor baik itu oleh BPK RI maupun audit antara provinsi maupun kabupaten sebagai auditor eksternal pemerintah daerah di Indonesia. Sehingga kualitas laporan keuangan dapat di pertanggungjawabkan dengan baik. Didalam kualitas laporan keuangan adanya akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal pemerintah dalam laporan keuangan.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Faktor pertama mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah akuntabilitas. Menurut (Costari and Belinda 2021) Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik. Semakin banyak perhatian sekarang diberikan. Sedangkan akuntabilitas berarti adanya pertanggungjawaban atas keputusan dan penggunaan sumber daya (Arnova and Lestari 2024).

Menurut (Agustin and Dwiningwarni 2023) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seorang (pemimpin, pejabat atau pelaksana) suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja dan tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang ditetapkan secara periodik. Berdasarkan konsep dari beberapa ahli tersebut, baik pemerintah pusat, daerah hingga desa harus

memahami ruang lingkup akuntabilitasnya masing-masing sesuai dengan tugas pokok yang diemban, karena akuntabilitas yang diminta mencakup tentang keberhasilan dan juga kegagalan dalam pelaksanaan instansi yang bersangkutan.

Berbagai penelitian tentang akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pernah diteliti oleh (Ferlia, Setiyowati, et al. 2023) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara pada hasil penelitian (A. Musa, Abdullah, and Hasan 2023) menyatakan akuntabilitas akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo. Pada penelitian (Ibrahim, Blongkod, and Rasjid 2024) dengan objek penelitian desa-desa di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo akuntabilitas tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara penelitian pada (Sari, Asmeri, and Meriyani 2024) menyatakan bahwa Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya dukungan dari faktor lain seperti transparansi, yang dalam praktiknya memungkinkan masyarakat untuk memantau, mengakses, dan mengevaluasi informasi keuangan secara terbuka (Bastian, 2020). Transparansi yang tinggi akan menciptakan kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas, yang pada akhirnya berdampak pada terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan transparansi sebagai prinsip keterbukaan yang

memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh akses informasi keuangan daerah secara luas. Dapat dikatakan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan hal penting bagi pemerintah. Terbukanya pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan akan menciptakan percayanya masyarakat kepada pemerintah dan keterbukaan tersebut akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi menuntut terciptanya keterbukaan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan keterbukaan untuk memberikan dan menyampaikan informasi (Rahayu & Dewi, 2022).

Berbagai penelitian tentang transparansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pernah diteliti oleh (Irenius and Ayudiati 2024) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. (Zubaidah & Nugraeni, 2023) menyatakan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak akan berjalan dengan baik ketika tidak didukung dengan sistem pengendalian internal yang memadai dari suatu instansi pemerintah daerah. Dengan meningkatnya sistem pengendalian internal akan memberikan dampak terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ikatan Akuntan Publik (2012) menyatakan sistem pengendalian internal (SPI) merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian kualitas laporan keuangan yang dilihat dari kenadalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan yang berlaku. Faktor lain yang mendukung berkualitasnya akuntabilitas, transparansi dan laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah kegiatan dan aktivitas yang saling terhubung yang dilakukan oleh pemimpin serta seluruh karyawan secara terus menerus untuk memastikan tujuan sebuah organisasi dapat tercapai.

Sistem pengendalian internal yang efektif memegang peran krusial dalam menjamin keandalan laporan keuangan, terutama di lingkungan pemerintahan daerah. Sistem ini mencakup serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang dirancang untuk mencegah kesalahan serta mendeteksi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Tanpa adanya pengendalian internal yang memadai, maka meskipun prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan, laporan keuangan tetap berisiko mengandung kesalahan atau manipulasi. Selain itu, studi oleh (Yulianti and Wardani, 2021) menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal mendorong pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan terhindar dari praktik korupsi, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Dengan demikian, sistem pengendalian internal bukan hanya pelengkap, melainkan fondasi yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses yang melekat dalam seluruh aktivitas organisasi dan dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pimpinan serta seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal menurut (Mulyadi, 2013) yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Pengendalian Intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal pemerintah adalah Proses yang dilakukan organisasi untuk memberikan jaminan tercapainya efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi.

Berbagai penelitian tentang pengaruh sistem pengendalain internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pernah diteliti oleh (Palalangan 2020) yang menguji hubungan sistem pengendalain intenal terhadap kualitas laporan keuangan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (Ferlia, Setyowati, et al. 2023) menyatakan bahwa Sistem Pengendalain Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara pada penelitian (Syafudin 2021) dalam penelitiannya menemukan hasil ahwa, sistem pengendalain internal pemerintah berpengaruh secara parsil dan simulatan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian oleh (Rahardjo, 2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan dinas

pemerintahan kota, karena mampu memperkuat ketelitian pencatatan dan kepatuhan terhadap prosedur.

Berdasarkan dari penelitian tersebut. Maka alasan penulis memilih variabel akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan adalah karena ketidakonsistenan hasil dari penelitian terdahulu, selain itu temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan juga menunjukkan kelebihan pembayaran atas jasa hotel dan paket pekerjaan, yang mencerminkan adanya celah dalam sistem pengendalian internal meskipun opini WTP telah diperoleh. Kurangnya keterbukaan akses mengenai laporan keuangan menjadi fokus permasalahan utama dalam penelitian ini. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intrenal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka?

2. Apakah ada pengaruh Tranparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka?
3. Apakah ada pengaruh Sistem Pengendalaian Internal Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka?
4. Apakah ada pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka
2. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka

4. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang tertarik dengan topik sejenis.
2. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan keputusan yang akan diambil sebagai pedoman akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal pemerintah.
3. Bagi akademik, sebagai acuan penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini di masa yang akan datang, khususnya akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.